

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermatapencarian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut (Iron dalam Mulyadi 2005).

Masyarakat dikawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan dalam wasak, m 2007). Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah sosial ekonomi yang begitu kompleks (Kusnadi, 2009). Selain permasalahan yang dimiliki oleh nelayan diatas, “nelayan juga

identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal” (Siswanto, Budi, 2008).

Menurut (Apridar, 2011) memanfaatkan potensi laut yang ada sudah menjadi kebiasaan dan cara utama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir. Namun kondisi masyarakat pesisir secara umum lebih-lebih adalah masyarakat nelayan yang masih tradisional berada dalam kondisi atau di bawah garis kemiskinan. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh (Karim, 2005) dalam penelitiannya di Kabupaten Sukabumi dan Karawang pada tahun 2005. Berdasarkan Indeks Angka Kemiskinan ada sekitar 0,3214 atau sekitar 32,14% berada dalam garis kemiskinan. Data ini terdiri dari sekitar 8.090 desa pesisir dengan penduduk desa pesisir mencapai 16,42 juta jiwa yang terdiri dari 3,91 juta Kepala Keluarga. Menurut Ivan Razali; Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 2004 yang diperoleh dari data Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa hampir 50% penduduk Desa Pantai Sumatera Utara berpendapatan 25 - 149 ribu rupiah perbulan padahal rata-rata sekitar 37.267 rupiah/ bulan. Secara umum masyarakat pesisir atau nelayan berada dalam kondisi yang sama yakni dalam garis kemiskinan.

Belum optimalnya pembangunan di bidang perikanan dapat dilihat dari adanya lingkaran kemiskinan yang menjerat nelayan hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan nelayan di Indonesia. Jumlah nelayan di Indonesia kurang lebih tiga puluh empat juta orang, 85% berpendidikan sekolah dasar (SD) atau buta huruf, 12% berpendidikan sekolah

lanjutan pertama (SLTP); 2,97% berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), dan 0,03% berpendidikan diploma (Dahuri, 2002).

Menurut data BPS Sulawesi Utara bahwa Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,92 tahun dan Angka Melek Huruf mencapai 99,46% berada diatas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Manado (12,20 tahun) dan terendah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan (6,50 tahun). Sementara untuk AMH mencapai 99,46 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Manado (99,91%) dan terendah di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan (98,33%) (BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2011).

Tingkat sosial ekonomi merupakan gambaran kedudukan seseorang dalam bermasyarakat yang biasanya ditentukan oleh unsur pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yaitu kelompok tinggi, kelompok menengah, dan kelompok rendah. Tingkat sosial ekonomi dapat mempengaruhi seseorang bisa menentukan suatu pilihan pengadaan jamban keluarga sesuai dengan kemampuannya (Abdulsyani dalam Muftukhah, 2007). Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama dalam pengadaan jamban keluarga.

Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia atau najis bagi suatu keluarga yang lazim disebut kakus atau WC (Mutmainna, 2009). Pengadaan jamban keluarga di daerah pesisir disamping harus memenuhi syarat kesehatan juga harus didasarkan pada sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tipe jamban keluarga yang sesuai dengan masyarakat pedesaan yaitu, jamban cemplung (*Pit Latrine*), jamban cemplung berventilasi, jamban empang (*Fishpond Latrine*), jamban pupuk (*The Compost Privy*), dan *latrine Septic Tank* (Notoadmodjo, 2007). kurangnya pembuangan kotoran manusia (Tinja) yang sehat dipicu oleh multifaktor, diantaranya tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang kondisi lingkungan yang baik, kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan lingkungan dan masih kurangnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan ini khususnya dalam pengadaan jamban keluarga (Anies, 2005).

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Makassar Pada tahun 2008 dapat dilihat bahwa dari 952.128 kepala keluarga yang diperiksa hanya 88,05 % kepala keluarga yang memiliki jamban, sedangkan jumlah jamban yang sehat sebanyak 466.193 kepala keluarga atau 33,39%, tahun 2009 dari 1.342.634 kepala keluarga yang diperiksa hanya 78,65% kepala keluarga yang memiliki jamban sedangkan jumlah jamban yang sehat sebanyak 539.025 kepala keluarga atau 51,04% ( Profil Sulsel, 2010 ).

Menurut hasil penelitian Soesanto, di pedesaan Indonesia hanya 18,36% rumah tangga yang memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan, salah satu

masalah pokok penyebab kesehatan lingkungan tidak layak pada masyarakat adalah pendapatan yang rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Masita di Desa Saragian Kecamatan Alu Kab. Polewali Mandar yaitu yang mempunyai pendapatan tinggi memanfaatkan JAGA sebanyak 13 KK (86,7%) dan tidak memanfaatkan JAGA sebanyak 2 KK (13,3%), sedangkan yang mempunyai pendapatan rendah memanfaatkan JAGA sebanyak 50 KK (40%) dan tidak memanfaatkan JAGA sebanyak 75 KK (60,0%) dan hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan tingkat pendapatan masyarakat dengan pemanfaatan JAGA.

Desa Pinolosian Selatan, merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berada di daerah Pesisir Pantai, sehingga Desa ini tidak lepas dari beberapa hal permasalahan, diantaranya permasalahan akan minimya Pengadaan Jamban Keluarga. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Pinolosian Selatan tersebut memiliki mata pencarian sebagai nelayan, yang pendapatannya tidak maksimal karena hasil yang mereka dapatkan bergantung pada hasil laut. Sedangkan hasil laut tersebut akan tinggi berdasarkan musim. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih tergolong rendah hal ini dikarenakan rata-rata tingkat pendidikan kepala keluarga hanya tamatan SD.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan bulan November 2014 bahwa Desa Pinolosian Selatan (Pin-Sel) memiliki 533 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 146 dan yang memiliki jamban keluarga hanya sebanyak 19 kepala keluarga, sedangkan yang lainnya hanya menggunakan MCK

dan juga WC gantung. Jumlah MCK yang ada di Desa Pin-Sel sebanyak 11 buah dan jumlah WC gantung yang ada di Desa Pin-Sel yakni 4 buah.

Terkait dengan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berjudul “ Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Pengadaan Jamban Keluarga di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Masih banyak masyarakat pesisir yang belum mempunyai jamban keluarga.
2. Banyak masyarakat pesisir hanya menggunakan WC gantung yaitu WC yang dibuat diatas permukaan air payau.
3. Pendapatan keluarga yang hanya bergantung pada hasil laut.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh sosial ekonomi masyarakat pesisir terhadap pengadaan jamban keluarga di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap pengadaan Jamban Keluarga di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan masyarakat pesisir terhadap pengadaan jamban keluarga.
2. Untuk menganalisis pengaruh jenis pekerjaan masyarakat pesisir terhadap pengadaan jamban keluarga.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan masyarakat pesisir terhadap pengadaan jamban keluarga.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti tentang pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap pengadaan jamban keluarga di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Pengalaman baru bagi peneliti dalam melakukan penelitian serta dapat menambah pengetahuan juga dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pembuatan proposal penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengadaan jamban keluarga khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Pinolosian Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.